

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN INDUSTRI PENDIDIKAN BERKUALITAS

Prof. Dr. Ir. MUCHLIS MUCHTAR, MS
Ketua BAPPEDA Tingkat I Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Memperhatikan kondisi Sumber Daya Manusia Sumatera Barat dewasa ini, kita menjadi gamang menatap masa depan yang terbentang dihadapan kita. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 2000 yang dimulai tahun 2001 ini, serta memasuki era globalisasi yang tantangannya cukup berat dan kompleks tentunya menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia, baik sebagai insani (manusia) maupun sebagai sumber daya pembangunan berkualitas yang akan mampu mensukseskan tugas-tugas pembangunan nasional dan daerah serta mengatasi setiap tantangan yang menghadang dan bahkan mampu menjadikan tantangan menjadi peluang bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kualitas SDM Sumatera Barat dewasa ini memang cukup memprihatinkan. Ini semua tentunya adalah karena kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan pada masa lalu yang secara jujur diakui kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan SDM khususnya dan pembangunan sosial budaya pada umumnya dan terlalu memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belajar dari pengalaman dan kekeliruan masa lalu itu dan sejalan dengan tujuan reformasi paradigma baru pembangunan Sumatera Barat, tentunya harus lebih berorientasi kepada peningkatan kualitas SDM, baik sebagai insani maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Dalam hubungan ini kiranya sungguh tepat apa yang telah diamanatkan oleh Pola Dasar Pembangunan Sumatera Barat 2001-2005 yang telah menggariskan visi serta prioritas pembangunan sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya manusia dan masyarakat Sumatera Barat yang mampu mensinergikan potensi adat dan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi pedoman yang tercermin dari perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu manusia dan masyarakat yang berkepribadian religius, sejahtera, adil, demokratis, terbuka, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ulet dan punya etos kerja yang tinggi, bermoral dan berakhlak mulia serta punya toleransi dan kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum dalam wadah persatuan dan negara Kesatuan RI, sehingga mampu menghadapi persaingan di era globalisasi terutama pada tahun 2020 mendatang.

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2001 – 2005

1. Peningkatan kualitas SDM warga Sumatera barat, baik dalam aspek fisik dan moral serta kepribadiannya maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pembangunan ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyat khususnya yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan ekonomi rakyat golongan bawah seperti usaha kecil, menengah dan koperasi.
3. Penataan pemerintahan sampai tingkat Nagari, dengan mensinergikan potensi adat, agama serta ilmu pengetahuan (modernisasi) dalam rangka memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan sehingga masyarakat Sumatera Barat serta birokrasi pemerintahan benar-benar siap untuk melaksanakan otonomi daerah.

Mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Pola Dasar Sumatera Barat 2001-2005, jelas menentukan kerja keras, sungguh-sungguh dan berlanjut dalam membangun berbagai sektor dan aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan kualitas SDM tersebut, karena banyak faktor yang menentukan kualitas SDM, dimensinyapun begitu kompleks.

Salah satunya yang cukup penting dan mendasar adalah faktor pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, disamping faktor-faktor lainnya seperti kesehatan, kesejahteraan, sosial dan lainnya.

Dan sesuai dengan topik pembahasan yang dimintakan panitia kepada kami, maka pokok-pokok uraian lebih lanjut adalah mengenai kebijakan dibidang pendidikan dalam rangka membangun SDM di Sumatera Barat.

KEADAAN SEKARANG

Pemerataan Pendidikan

Salah satu komponen pemerataan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk Propinsi Sumatera Barat jumlah SD/MI sebanyak 4.306 buah dengan jumlah murid sebanyak 644.815 orang, dengan APK 97,67% (tidak termasuk Paket A) dan APM 82,24 %. Jumlah SLTP dan MTs di Sumatera Barat sebanyak 782 buah dengan siswa sebanyak 248.643 orang, APK 81,18 % (tidak termasuk Paket B) dan APM 60,67 %, sedangkan SLTA (SMU-MA-SMK) berjumlah 454 buah dengan siswa sebanyak 169.693 orang, APK 57,71% dan APM 41,31 %.

Mutu Pendidikan

Kinerja mutu pendidikan di Propinsi Sumatera Barat mencakup berbagai komponen, satu diantaranya membandingkan rata-rata NEM masukan dengan NEM lulusan. Untuk tingkat SLTP NEM masukan 5,73 dan NEM lulusan 5,21, SMU dengan NEM masukan 5,29 dan NEM lulusan 5,18, begitu juga dengan NEM menurut bidang studi (Lampiran 1), kelihatannya rendah dan mengkuatirkan.

Relevansi Pendidikan

Untuk indikator relevansi antar tingkat SD, SMU, SMK berbeda satu sama lain. Untuk SD mengacu kepada kurikulum muatan lokal yang ada (Budaya Alam Minangkabau, Arab Melayu dan Keterampilan Minangkabau), sedangkan untuk SMU setidaknya penjurusan di sekolah dilaksanakan sesuai dengan prestasi dan bakat siswa.

Efisiensi Pendidikan

Pelaksanaan efisiensi pendidikan difokuskan pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan sasaran jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, putus sekolah, mengulang dan lama belajar serta rasio keluaran dan masukan. Bagi Propinsi Sumatera Barat, komponen pendidikan di atas masih mempengaruhi tingkat peningkatan mutu pendidikan dan perlu ditindaklanjuti.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Berbagai kebijaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah memberikan hasil yang cukup melegakan. Namun dilain pihak timbul berbagai macam permasalahan pembangunan, baik disebabkan oleh dampak pembangunan itu sendiri maupun oleh dampak krisis ekonomi/moneter maupun keterceceran/ketertinggalan, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Sehubungan dengan itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ke depan, pembangunan pendidikan di Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

1. Prasarana dan sarana pendukung penyelenggara pendidikan yang belum memadai.
2. Pemerataan pendidikan dasar dan menengah masih dihadapkan pada permasalahan efisiensi.
3. Pendidikan persiapan kerja belum sepenuhnya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia pada berbagai sektor.
4. Mutu pendidikan yang relatif rendah yang disebabkan antara lain :
 - a. Proses pembelajaran berorientasi penguasaan teori dan hafalan pada semua bidang studi, menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran peserta didik sebagai inti dari keberhasilan pendidikan, kurang berkembang.
 - b. Kurikulum sekolah terstruktur dan sarat beban menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi steril terhadap keadaan dan permasalahan lingkungan. Akibatnya, proses pendidikan menjadi rutin, tidak menarik dan kurang mapu mengembangkan kreatifitas murid, guru atau pengelola dalam melaksanakan proses pendidikan yang inovatif.
 - c. Pembinaan proses jabatan guru masih dilakukan secara terpisah-pisah (*fragmented*) atau dengan kata lain, tidak ditata dalam suatu sistem integral, sehingga mutu profesi guru belum dapat diandalkan sebagai faktor terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan.
 - d. Kurangnya keterampilan menajerial pengelola pendidikan.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan rohani dan jasmani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, mempunyai etos kerja, profesionalisme, kreatif dan inovatif.

Sasaran Pembangunan Pendidikan adalah :

1. Terciptanya sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa depan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

2. Tersedianya lembaga pendidikan disegala jenis dan jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal, yang merata dan seimbang termasuk daerah terpencil dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental.
3. Terbentuknya *pool* tenaga kependidikan yang bermutu, profesional dan berdedikasi tinggi
4. Terbentuknya sistem penghargaan/penggajian tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kemampuan, profesionalisme dan pengabdian.
5. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan fungsional.
6. Meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan termasuk penyelenggaraan pendidikan, penyusunan kurikulum, penyediaan beasiswa dan bentuk peran serta lainnya.
7. Membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
8. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bermutu.
9. Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan pra sekolah melalui jalur sekolah dan luar sekolah yang memadai sebagai dasar mempersiapkan siswa memasuki jenjang sekolah dasar.
10. Tertanamnya nilai-nilai ajaran agama sebagai landasan moral, spritual dan etika dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan beragama.
11. Terbentuknya sistem nilai budaya Minangkabau yang berdasarkan falsafah *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.
12. Terciptanya sistem dan manajemen pendidikan dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk perantau dan dunia usaha.
13. Tersedianya tenaga pendidikan yang lebih profesional dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berwibawa dengan tingkat kesejahteraan yang memadai.

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Dalam upaya mencapai tujuan serta sasaran pendidikan yang telah ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu menuju terciptanya manusia yang berkualitas, khususnya masyarakat yang berdomisili Sumatera Barat.
2. Meningkatkan kemampuan akademik, guru dan staf pengajar sehingga tenaga pendidik mampu secara optimal terutama dalam peningkatan watak dan budi pekerti.
3. Melakukan pembaharuan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan daerah serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan, baik melalui jenjang pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuwan dan manajemen.
6. Mengembangkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan bagi Aparatur Pemerintah (S2 dan S3) serta jalur pendidikan dasar dan menengah.

POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar dan Menengah
 - a. Peningkatan pemerataan pendidikan dasar dan menengah
 - b. Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah
2. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
 - a. Program penataan sistem pendidikan tinggi
 - b. Program peningkatan kualitas dengan relevansi
3. Program Pembinaan Pendidikan Luar Biasa

PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN SDM

Disamping pembangunan dibidang pendidikan sebagai salah satu pilar penting dalam mempersiapkan SDM berkualitas, berbagai program lain yang tidak kalah pentingnya adalah :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
2. Pengembangan nilai-nilai budaya Minangkabau
3. Peningkatan mutu SDM Aparatur Pemerintah
4. Pengembangan ketenagakerjaan
5. Peningkatan pelayanan kesehatan
6. Peningkatan peran dan kapasitas individu pemuda dan anak remaja
7. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga
8. Pemberdayaan perempuan

Dalam pelaksanaan, maka setiap program akan terdapat beberapa kegiatan proyek pembangunan, baik yang didanai oleh APBN/BLN maupun dari APBD dan DAU seperti tersaji pada Lampiran 2, 3 dan 4. Sehubungan dengan itu pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah melakukan persiapan-persiapan dan kordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga terkait.

PENUTUP

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lampiran 1.

NEM Rata-Rata SD Se-Sumatera Barat Tahun Ajaran 1997/1998-1999/2000

Tahun	Bidang Studi					
	PPKN	IPS	IPA	MTK	BI	Rataan
1997/1998	6,09	4,43	5,34	5,04	5,30	5,24
1998/1999	6,05	4,49	6,30	4,64	5,61	5,82
1999/2000	7,14	4,74	6,61	6,39	6,83	6,34

*Sumber : Hasil Ebtanas-Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat***NEM Rata-Rata SLTP Se-Sumatera Barat Tahun Ajaran 1997/1998-1999/2000**

Tahun	Bidang Studi						
	PPKN	IPS	IPA	MTK	BI	B. ING	Rataan
1997/1998	6,84	5,21	4,43	4,20	6,52	4,45	5,22
1998/1999	6,50	5,38	4,56	5,80	6,06	5,68	5,66
1999/2000	5,90	5,08	4,93	5,32	5,05	5,08	5,23

*Sumber : Hasil Ebtanas-Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat***NEM Rata-Rata SMU Se-Sumatera Barat Tahun Ajaran 1997/1998-1999/2000**

Tahun	Bidang Studi						
	PPKN	IPS	IPA	MTK	BI	B. ING	Rataan
1997/1998	5,63	5,53	5,63	4,62	6,29	4,97	5,45
1998/1999	6,38	5,27	5,40	3,96	5,59	4,94	5,26
1999/2000	-	5,84	6,09	-	5,76	-	5,56

Sumber : Hasil Ebtanas-Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Barat

Lampiran 2.

DANA SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 1999 / 2000		
I. APBN		
1	UNAND	Rp. 15.193.876.000,-
2	UNP	Rp. 13.918.395.000,-
3	Kopertis IX	Rp. 6.110.839.000,-
4	IAIN	Rp. 2.931.615.000,-
5	STSI/ASKI	Rp. 1.678.340.000,-
6	STAIN Batusangkar	Rp. 700.000.000,-
7	STAIN Bukittinggi	Rp. 499.950.000,-
8	Kanwil Depdiknas	Rp. 57.345.740.000,-
	J u m l a h	Rp. 98.378.755.000,-
II. APBD		
1	Dinas P & K	Rp. 5.482.663.000,-
2	Biro Binsos	Rp. 1.132.000.000,-
3	Biro Kepegawaian	Rp. 330.000.000,-
	J u m l a h	Rp. 6.944.663.000,-
	T O T A L	Rp. 105.323.418.000,-

Sumber : Laporan Konsolidasi Triwulan T.A. 2000-Bappeda

Keterangan :

♦ Jumlah APBN Prop. Sumbar	Rp. 1.605.099.900.000,-
♦ Jumlah APBD Prop. Sumbar	Rp. 96.325.550.000,-
T O T A L	Rp. 1.701.425.450.000,-

Posentase dana sektor pendidikan = $\frac{\text{Rp. 105.323.418.000,-}}{\text{Rp. 1.701.425.450.000}} \times 100 \% = 6,19 \%$

Lampiran 3.

DANA SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2000		
I. APBN		
1	UNAND	Rp. 9.010.470.000,-
2	UNP	Rp. 7.084.617.000,-
3	Kopertis IX	Rp. 3.095.847.000,-
4	IAIN	Rp. 1.700.000.000,-
5	STSI/ASKI	Rp. 1.678.540.000,-
6	STAIN Batusangkar	Rp. 1.000.000.000,-
7	STAIN Bukittinggi	Rp. 800.000.000,-
8	Politeknik Pertanian (DIII) Payakumbuh	Rp. 646.996.000,-
9	Pengembangan Politeknik (DIII) Negeri Padang	Rp. 951.658.000,-
10	Kanwil Depdiknas	Rp. 36.693.277.000,-
	J u m l a h	Rp. 62.661.405.000,-
II. APBD		
1	Dinas P & K	Rp. 814.151.000,-
2	Binsos (SM Unggul + Perguruan Tinggi)	Rp. 1.000.000.000,-
3	Biro Kepegawaian	Rp. 2.195.000.000,-
	J u m l a h	Rp. 4.009.151.000,-
	T O T A L	Rp. 66.670.556.000,-

Sumber : Laporan Konsolidasi Triwulan T.A. 2000-Bappeda

Keterangan :

◆ Jumlah APBN Prop. Sumbar	Rp. 372.363.159.000,-
◆ Jumlah APBD Prop. Sumbar	<u>Rp. 56.269.351.000,-</u>
T O T A L	Rp. 428.632.510.000,-

$$\text{Posentase dana sektor pendidikan} = \frac{\text{Rp. 66.670.556.000,-}}{\text{Rp. 428.632.510.000,-}} \times 100 \% = 15,55 \%$$

Lampiran 4.

DANA SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2001		
I. APBN		
1	UNAND	Rp. 9.827.640.000,-
2	UNP	Rp. 8.589.169.000,-
3	Kopertis IX	Rp. 3.354.272.000,-
4	IAIN	Rp. 1.650.000.000,-
5	STSI/ASKI	Rp. 1.852.024.000,-
6	STAIN Batusangkar	Rp. 900.000.000,-
7	STAIN Bukittinggi	Rp. 750.000.000,-
8	Politeknik (DIII) Payakumbuh	Rp. 1.156.231.000,-
9	Pengembangan Politeknik (DIII) Negeri Padang	Rp. 1.494.335.000,-
8	Kanwil Depdiknas	Rp. 65.864.201.000,-
	J u m l a h	Rp. 95.437.872.000,-
II. APBD		
1	Dinas P & K	Rp. 3.173.000.000,-
2	Biro Binsos	Rp. 6.802.000.000,-
3	Biro Kepegawaian	Rp. 1.250.000.000,-
	J u m l a h	Rp. 11.225.000.000,-
	T O T A L	Rp. 106.662.872.000,-

Sumber : Laporan Konsolidasi Triwulan T.A. 2000-Bappeda

Keterangan :

◆ Jumlah APBN Prop. Sumbar	Rp. 235.861.865.000,-*)
◆ Jumlah APBD Prop. Sumbar	<u>Rp. 81.534.375.000,-</u>
T O T A L	Rp. 317.396.240.000,-

Posentase dana sektor pendidikan = $\frac{\text{Rp. 106.662.872.000,-}}{\text{Rp. 317.396.240.000,-}} \times 100 \% = 33,60 \%$

*) belum termasuk ABT

TANYA JAWAB

Jurnalis Uddin

1. Ada statemen bahwa dulu Sumbar pernah mempunyai industri pendidikan. Setahu saya beberapa tokoh Minang, seperti Muh. Hatta, Muh. Yamin dan H. Agus Salim, bukanlah merupakan produk lembaga pendidikan di Ranah Minang, melainkan produk lembaga pendidikan di Pulau Jawa dan Luar negeri. Mohon diklarifikasi statemen tersebut.
2. Statemen Bapak, bahwa seolah-olah PTS amburadul, tidaklah benar. Apakah semua PTS seperti itu? Mohon diklarifikasi.
3. Apa yang menjadi masalah utama pendidikan di Sumbar secara substansi dan manajemen.

Muchlis Muchtar

1. Memang tokoh-tokoh Minang seperti Muh. Hatta., Muh. Yamin dan H. Agus Salim merupakan produk pendidikan di luar Minang. Tapi selain mereka rasanya kita tidak dapat memungkiri bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Ranah Minang cukup terkenal dan diminati.
2. Tentang PTS, yang saya maksud bukanlah semua PTS amburadul, namun sekarang ada trend di kalangan kelas menengah di Sumbar untuk menyekolahkan anaknya di luar daerah Sumbar, walaupun mereka kuliah di PTS.
3. Masalah utama pendidikan di Sumbar adalah in efisiensi, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya anggaran untuk sektor pendidikan.

Jafrinur

1. Mengenai sinkronisasi dan sinergis, program apa saja yang perlu dikembangkan dalam pembangunan SDM di Sumbar – menyangkut *planning, programming dan budgeting*.
2. Dari segi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, Sumbar belum kondusif bagi terciptanya industri pendidikan. Mohon tanggapan Bapak.

Muchlis Muchtar

1. Sinkronisasi dan sinergis antar program pendukung terciptanya SDM berkualitas akan terus dilakukan.
2. Sarana dan prasarana pendidikan di Sumbar secara terus menerus akan kita benahi.

Razali Nazir

Fungsi tigo tungku sajarangan – Alim ulama- Ninik Mamak-Cadiak Pandai-, kelihatan perannya belum maksimal. Mungkinkah *Bundo Kanduang* dapat dimasukkan menjadi tungku keempat (*Ampek tungku sajarangan*).

Muchlis Muchtar

Saya sependapat dengan Bapak, namun perlu kesepakatan diantara tokoh-tokoh masyarakat Minang.